DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSEMBAHAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR GRAFIK xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 9
1.4. Keguna an Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka 11
2.1.1. Implementasi Kebijakan 11
2.1.1.1. Definisi Implementasi 11
2.1.1.2. Definisi Kebijakan 13
2.1.1.3. Definisi Implementasi Kebijakan 20
2.1.1.4. Model Implementasi Kebijakan 23
2.1.2. Peraturan Daerah 32
2.1.3. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) 32
2.1.4. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) 33
2.2. Kerangka Pemikiran 34

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian 45
3.1.1. Kota Bandung 45
3.1.2. Gambaran Umum Perdwal Bandung No.888 Tahun 2012 Tentang Teknis Pelaksanaan Perda Kota Bandng No. 4 Tahun 2011 51

3.2. Metode Penelitian 55
3.2.1. Desain Penelitian 55
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 57
3.2.2.1. Studi Pustaka 57
3.2.2.2. Studi Lapangan 57
3.2.3. Teknik Penentuan Informan 58
3.2.4. Teknik Analisis Data 60
3.2.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Komunikasi Aparatur Pemerintahan Kota Bandung dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tujuh Titik Zona Merah 64
4.1.1. Penyampaian Informasi Pelaksanaan Perwal Penatan PKL dalam Pekrembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 66
4.1.2. Kejelasan Pelaksanaan Perwal Penataan PKL dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 69
4.1.3. Konsistensi Pelaksanaan Perwal Penataan PKL dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 72
4.2. Sumberdaya Pelaksanaan Kebijakan Perwal Penataan dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 74
4.2.1. Aparatur Pelaksanaan Kebijakan Perwal Penataan dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 75
4.2.2. Informasi Pelaksanaan Kebijakan Perwal Penataan dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 77
4.2.3. Wewenang Pelaksanaan Kebijkan Perwal Penataan dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 78
4.2.4. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Perwal Penataan dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 80
4.3. Disposisi Pelaksanaan Kebijakan Perwal Penataan dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 84
4.3.1. Tingkat Kepatuhan Pelaksana dalam Melaksanakan Kebijakan Perwal Penataan Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 85

4.3.2. Pemberian Insentif Pelaksanaan Kebijakan Perwal Penataandalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 87
4.4. Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kebijakan Perwal Penataan dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 88
4.4.1. SOP Pelaksanaan Kebijakan Perwal Penataan dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 89
4.4.2. Penyebaran Tanggung Jawab Pelaksanaan Kebijakan Perwal Penataan dalam Perkembangan PKL di Tujuh Titik Zona Merah 90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan 94
5.2. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN